

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) perjalanan dinas Di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023. Kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti adalah Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sudah melakukan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sejak 2019, akan tetapi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sampai saat ini belum terlaksana secara optimal oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) yang diukur berdasarkan teori William dan Dunn dalam Sugito dan Joko Triyono (2020) dengan 6 (enam) indikator,<sup>140</sup> yaitu:

##### **1. Efektivitas**

Pada dimensi efektivitas dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) belum berjalan dengan efektif mengalami kendala yang menghambat keberhasilannya. Tidak terlaksananya program KKP di BNPP RI menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan untuk mencapai hasil yang diharapkan dan tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun KKP memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengeluaran pemerintah, beberapa kendala di BNPP RI seperti keterbatasan teknologi, kurangnya dorongan untuk menggunakan KKP, serta minimnya sosialisasi dan penyuluhan kepada pegawai yang berkewenangan menjadi penyebab utama hambatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki implementasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut guna mencapai efektivitas yang diinginkan dalam pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI.

---

<sup>140</sup> William n Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. by Muhadjir Darwin, 2nd edn (Gadjah Mada University Press).

## 2. Efisiensi

Pada dimensi efisiensi dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bahwa Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) meningkatkan efisiensi dalam transaksi keuangan pemerintah. Efisiensi ini tercapai melalui percepatan transaksi dan pengurangan biaya administratif, karena KKP mempermudah proses tanpa menunggu pencairan dana dari KPPN. KKP juga memfasilitasi pembayaran elektronik, meningkatkan transparansi dan meminimalisir risiko kecurangan, dengan semua transaksi tercatat digital. Biaya tambahan untuk penggunaan KKP tidak ada, kecuali biaya materai. Meskipun kontribusinya positif, program KKP di BNPP RI perlu peningkatan untuk mencapai efisiensi penuh. Secara umum, KKP memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi transaksi keuangan pemerintah.

## 3. Kecukupan

Pada dimensi kecukupan dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) sudah memenuhi kecukupan untuk perjalanan dinas BNPP RI. Walaupun hanya terbatas pembelian tiket Pesawat dalam jenis belanja Kartu Kredit Pemerintah akan tetapi menurut peneliti hal tersebut sudah mencukupi dalam kegiatan kedinasan yang dilakukan oleh BNPP RI. Hanya pegawai dan pejabat diperlukannya untuk mempelajari cara mencatat pembukuan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.

## 4. Perataan

Pada dimensi perataan dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terlihat belum merata. Hal tersebut dikarenakan, distribusi KKP di BNPP RI belum merata, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di bawah Deputi 1 (satu). Hal ini menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam aksesibilitas KKP di seluruh BNPP RI. Selain itu, infrastruktur pembayaran non-tunai seperti mesin *Electronic Data Capture* (EDC) juga belum merata di wilayah perbatasan, mengindikasikan ketidakmerataan dalam akses terhadap teknologi pembayaran di wilayah perbatasan. Meskipun telah ada kemajuan dalam penggunaan teknologi *mobile banking* untuk KKP, masih ada kendala karena banyak vendor di Perbatasan

yang belum memiliki akses ke pembayaran non-tunai karena masih banyak pengusaha atau vendor di Perbatasan yang tidak mendaftarkan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan demikian, diperlukan strategi komprehensif untuk meningkatkan pemanfaatan KKP di BNPP RI, termasuk upaya perataan distribusi, peningkatan infrastruktur teknologi di wilayah perbatasan, serta sosialisasi yang lebih luas tentang penggunaan teknologi pembayaran non-tunai.

## **5. Responsivitas**

Pada dimensi responsivitas dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) disimpulkan bahwa responsivitas terhadap pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) masih belum optimal. Faktor utama penyebab ketidakefektifan ini adalah kurangnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara internal oleh Badan Nasional Pengelolaan Pembiayaan Daerah (BNPP RI). Kekurangan ini mengakibatkan berbagai permasalahan yang muncul tidak dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, BNPP RI yang memiliki tugas untuk pembangunan infrastruktur perbatasan dapat mengoptimalkan pembangunan teknologi dan internet di perbatasan.

## **6. Ketepatan**

Pada dimensi ketepatan dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) disimpulkan bahwa pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di BNPP RI belum tepat. Hal tersebut disebabkan oleh Kartu Kredit yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu yang menurut peneliti kurang tepat, karena seharusnya yang memegang kepala pelaksana kegiatan kedinasan pada setiap biro atau bagian di BNPP RI. Sehingga, diharapkan untuk pemegang Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI untuk kedepannya dapat diganti menjadi kepala pelaksana kegiatan dalam kedinasan, sehingga kegiatan dapat berjalan secara optimal dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan tugasnya dalam merekap dokumen-dokumen serta anggaran dan pembayaran untuk pemulihan limit Kartu Kredit Pemerintah.

Berdasarkan pada kesimpulan di atas bahwa dari 6 (enam) dimensi dari William N Dunn dalam Sugito dan Joko Triyono dalam evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik

Indonesia (BNPP RI) dari dimensi efisiensi dan kecukupan sudah baik dalam program Kartu Kredit Pemerintah ini, karena memberikan keamanan dan kecepatan transaksi. Sedangkan dalam dimensi efektifitas, perataan, responsivitas, dan ketepatan belum tercapai di BNPP RI, karena masih belum meratanya ketersediaan internet dan mesin EDC di organisasi perbatasan serta belum adanya evaluasi secara internal dan belum tercapainya keberhasilan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI.

Diketahui juga, bahwa terdapat kekurangan dan kelebihan dari Kartu Kredit Pemerintah ini. Berikut kelebihan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah apabila dilaksanakan:

- *Pertama*, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah ini memiliki kelebihan dalam kemudahan pemantauan transaksi yang dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit Pemerintah oleh Bendahara Pengeluaran (BP) karena arus transaksi akan diberikan langsung oleh Bank penerbit.
- *Kedua*, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah dapat menghindari penyimpanan Uang Persediaan (UP) tunai oleh Bendahara Pengeluaran (BP) yang mengakibatkan terjadinya kerusakan uang tunai.
- *Ketiga*, pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah juga dapat meminimalisir terjadinya pencurian atau kejahatan yang menimbulkan hilangnya uang tersebut.

Kemudian, juga terdapat kekurangan dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI, yaitu:

- *Pertama*, infrastruktur teknologi atau dapat dikatakan penunjang agar pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah dapat terlaksana belum merata di BNPP RI.
- *Kedua*, belum tersosialisasikan secara menyeluruh pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah kepada pemegang Kartu Kredit Pemerintah ataupun pihak-pihak ketiga yang disebut juga vendor atau pihak yang menyediakan barang yang berada di Perbatasan terutama pentingnya pendaftaran Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga mereka tidak terbatas pada penggunaan tunai dan dapat menggunakan mesin EDC atau lainnya sebagai transaksi.

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa Kartu Kredit Pemerintah perjalanan dinas belum bisa berjalan secara optimal di BNPP RI karena lingkungan yang belum mendukung Penggunaan transaksi non-tunai di wilayah kerja BNPP RI, yakni perbatasan. Sehingga, apabila ingin terlaksananya pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas maka diperlukannya perbaikan infrastruktur teknologi terlebih dahulu di wilayah perbatasan baik di Kota ataupun di pedalamannya agar Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas dapat diterapkan di BNPP RI. Selain itu, BNPP RI juga dapat melakukan penurunan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah, sehingga adanya pengecualian untuk BNPP RI dalam kewajiban memanfaatkan Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pada kesimpulan dari hasil penelitian evaluasi pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023, terdapat rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu,

### **5.2.1 Saran Teoritis**

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menggali dengan dalam terkait sumber-sumber dan Referensi yang akan digunakan dalam melakukan penelitian terkait Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI).
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dapat melaksanakan penelitian secara spesifik dan juga mendalam mengenai evaluasi dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023.
3. Hasil penelitian ini berfokus kepada evaluasi dari pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023. Sehingga, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menggali lebih penelitian mengenai pelaksanaan serta *monitoring* dari Kartu Kredit Pemerintah di Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Tahun 2023.

### 5.2.2 Saran Praktis

1. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) agar dapat lebih dapat mengoptimalkan untuk mendorong pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah di BNPP RI.
2. Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) diharapkan dapat mengubah pemegang KKP yang tadi nya Bendahara Pengeluaran Pembantu menjadi kepala kegiatan dalam kedinasan di setiap bagian di BNPP RI.
3. Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) diharapkan mengundang narasumber dari BNI dan KPPN agar Pejabat dan Pegawai dapat mengetahui lebih mendalam terkait mekanisme pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah.
4. Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) diharapkan dapat mendorong KPPN dan BNI agar dapat memberikan sosialisasi kepada pengusaha di Perbatasan agar mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).
5. Kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) diharapkan dapat melakukan monitoring dan evaluasi terkait kegagalan pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah. Kemudian, dapat melakukan koordinasi kepada KPPN apakah Kartu Kredit Pemerintah perjalanan dinas dapat dikecualikan di BNPP RI sehingga dikecualikan dari terkena sanksi atau terdapat tindakan lainnya.